



# ***Rencana Strategis***

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi

## **2024 - 2026**

(RENSTRA PERUBAHAN)





**Rencana Strategis  
(RENSTRA) 2024 – 2026  
(Perubahan)**  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Pemerintah Kota Bekasi

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya serta ucapan terima kasih kepada tim Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dan pihak – pihak terkait yang terlibat sehingga Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Dengan akan berakhirnya periode RPJMD Kota Bekasi tahun 2018 – 2023, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi perlu untuk menetapkan suatu proses rencana kerja yang berorientasi terhadap capaian kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan. Mengingat Pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2023 - 2024 belum memiliki Kepala Daerah terpilih, sehingga dalam penyusunan Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi ini mengacu terhadap Rencana Pembagunan Daerah (RPD) melalui Tema Pembangunan Pemerintah Kota Bekasi tahun 2024 – 2026.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026 adalah untuk menjabarkan Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dalam mencapai hasil kinerja yang diinginkan, dengan maksud menjadi pedoman atau sebagai acuan dalam melaksanakan penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan dilingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Demikian Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026 ini dibuat, kami menyadari dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Perubahan ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat kekurangan, maka dari itu kami membutuhkan saran dan kritik membangun agar kami bisa lebih baik. Semoga dokumen rencana strategis Perubahan ini dapat dilaksanakan secara komprehensif dan konsisten serta dapat memberikan manfaat, khususnya bagi OPD Kesatuan Bangsa dan Politik dan Pemerintah Daerah Kota Bekasi juga kepada masyarakat yang membutuhkan informasi pada umumnya.

Bekasi,                      Februari 2024  
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA BEKASI**

  
**NESAN SUJANA, S.T., M.T.,CGCAE**

**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI .....</b>	<b>7</b>
2.1 Tugas, Fungsi, Standar Operasional Prosedur dan Struktur Organisasi .....	8
2.1.1 Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi .....	7
2.1.2 Struktur Organisasi.....	7
2.1.3 Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi .....	9
2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.....	9
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	9
a. Klasifikasi Aparatur menurut jenis status kepegawaian....	10
b. Klasifikasi Aparatur menurut Gender .....	11
c. Klasifikasi Aparatur menurut Kelompok Usia .....	12
d. Klasifikasi Aparatur menurut Pendidikan .....	13
e. Klasifikasi Aparatur menurut Jabatan .....	14
2.2.2 Sumber Daya Sarana Prasarana Pendukung Operasional Organisasi.....	15
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023 .....	16
2.4 Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023 .....	30
2.5 Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah.....	34
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>36</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.....	37
3.2 Isu – Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi .....	38
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>39</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi 2024 – 2026 .....	40
4.2 Proyeksi Cascading Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026.....	40
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>41</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN..</b>	<b>44</b>
6.1 Pendanaan Indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2024 -2026 .....	47
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN .....</b>	<b>48</b>
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	<b>49</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.2.3	Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.....	9
Tabel 2.2.1.a	Klasifikasi Aparatur berdasarkan jenis status kepegawaian.....	10
Tabel 2.2.1.b	Klasifikasi Aparatur berdasarkan Gender .....	11
Tabel 2.2.1.c	Klasifikasi Aparatur berdasarkan Kelompok Usia.....	12
Tabel 2.2.1.d	Klasifikasi Aparatur berdasarkan Pendidikan .....	13
Tabel 2.2.1.e	Klasifikasi Aparatur berdasarkan Jabatan.....	14
Tabel 2.2.2	Aset/ Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.....	16
Tabel 2.3.1	Tujuan dan Sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi, Periode : 2018 – 2023.....	17
Tabel 2.3.2	Realisasi Capaian Kinerja Badan Kesbangpol 2018 – 2022.....	19
Tabel 2.3.3	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023.....	29
Tabel 2.4.1	Realisasi Anggaran Badan Kesbangpol 2018 – 2022.....	31
Tabel 2.5.1	Tantangan dan Peluang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.....	34
Tabel 3	Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Bekasi Tahun 2021.....	36
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan dalam penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Bekasi .....	37
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi 2024 – 2026 .....	40
Tabel 5	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Periode 2024 – 2026 .....	41
Tabel 6	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi 2024 – 2026.....	44
Tabel 7	Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026 .....	48

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Proses tahapan dan tata cara penyusunan Renstra.....	1
Gambar 2.1.2	Struktur Organisasi Badan Kesbangpol Kota Bekasi .....	8
Gambar 2.2.1.a	Pie Chart Aparatur berdasarkan jenis status kepegawaian .....	10
Gambar 2.2.1.b	Pie Chart Aparatur berdasarkan Gender .....	11
Gambar 2.2.1.c	Diagram Aparatur berdasarkan Kelompok Usia.....	12
Gambar 2.2.1.d	Pie Chart Aparatur berdasarkan Pendidikan .....	13
Gambar 2.2.1.e	Diagram Aparatur berdasarkan Jabatan.....	14
Gambar 4	Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026.....	39

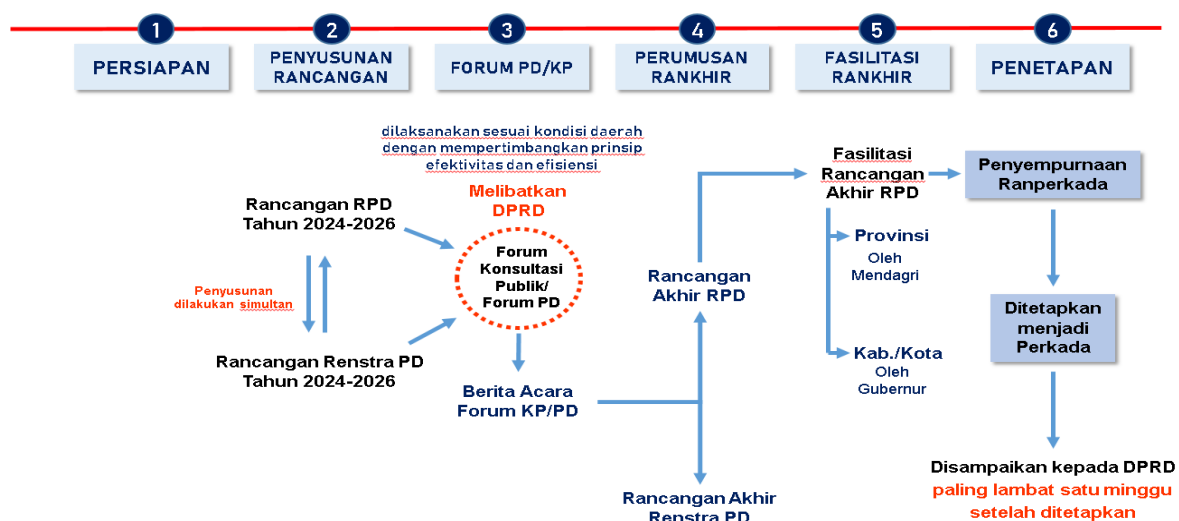
## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Mengingat akan berakhirnya periode masa kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih untuk tahun 2018 – 2023. Maka menindaklanjuti hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi harus mempersiapkan Rencana Strategis dalam rangka melaksanakan Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan dalam rangka melaksanakan amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya urusan Pemerintahan Umum.

Dapat diketahui bahwa kondisi pada akhir tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, pada tahun tersebut terdapat kekosongan Kepala Daerah di Kota Bekasi. Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi perlu untuk mempersiapkan dan menentukan Rencana Strategis (RENSTRA) dalam rangka perencanaan pembangunan daerah di Kota Bekasi dengan metode pendekatan teknokratik pada tahun 2024 – 2026. Adapun alur proses tahapan dan tata cara penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

**Gambar 1.1**  
**Proses tahapan dan tata cara penyusunan Renstra**



Berdasarkan gambar diatas terkait dengan Proses tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Strategis, dapat dijelaskan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah yang dibuat atau yang telah ditentukan harus terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat. Tidak beda dengan Rencana Strategis yang disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi ini yang juga harus memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dari Pemerintah Kota Bekasi untuk Tahun 2024 – 2026.

Selain itu juga secara substansi dengan disusunnya Rencana Strategis ini bersifat hirarki, yang artinya dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi tahun 2024 – 2026 menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi untuk Tahun 2024, Tahun 2025 dan Tahun 2026. Melalui Rencana Strategis ini diharapkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi yang akan disusun nantinya bisa terarah dan tepat sasaran sesuai dengan target rencana yang telah ditetapkan.

## 1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) ini sebagai dasar landasan hukum penyusunan Renstra Badan Kesbangpol Kota Bekasi 2024 – 2026, diantaranya :

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomo 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011 – 2031;
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bekasi Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

- Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
12. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembinaan Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 42 Seri D);
  13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 129 Seri D);
  14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2024 - 2026 ini dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan sebagai landasan dan pedoman bagi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan selama 3 (tiga) tahun ke depan sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta untuk menyesuaikan arah perencanaan pembangunan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024 - 2026.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis ini adalah untuk memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja serta panduan dalam pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi untuk tahun 2024 – 2026.

### 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB I. PENDAHULUAN,**

Bab ini membahas tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra;

#### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH,**

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi, struktur perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah dan

kelompok sasaran layanan perangkat daerah serta tantangan juga peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah;

**BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH,**

Bab ini menjelaskan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi layanan perangkat daerah, melakukan telaahan terhadap rencana pembangunan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026, dan proyeksi Cascading Kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026.

**BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN,**

Bab ini mengemukakan strategi, arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026;

**BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN,**

Bab ini mengemukakan pernyataan strategi dan arah kebijakan dalam rangka capaian tujuan dan sasaran kinerja yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026;

**BAB VI. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN,**

Bab ini mengemukakan rumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta indikator target kinerja dan pendanaan indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026;

**BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN,**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian rencana pembangunan Pemerintah Kota Bekasi tahun 2024 - 2026.

**BAB VIII. PENUTUP,**

Pada bagian ini dikemukakan tentang masa berlakunya (periodesasi) Renstra dan catatan penting di dalam penyusunan Renstra.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi, peranan yang dilaksanakan adalah sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Adapun susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, yang terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Jabatan Fungsional (Sub Koordinator Perencanaan, Sub Koordinator Keuangan dan Arsiparis ).
3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, yang terdiri atas :
  - a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
  - b. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa;
4. Bidang Politik Dalam Negeri, yang terdiri atas :
  - a. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan
  - b. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat, yang terdiri atas :
  - a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
  - b. Sub Bidang Organisasi Masyarakat;
6. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, yang terdiri atas:
  - a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
  - b. Sub Bidang Penanganan Konflik;

## 2.1 Tugas, Fungsi, Standar Operasional Prosedur dan Struktur Organisasi

### 2.1.1 Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi

Berdasarkan peranan tugas dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi, diantaranya :

- Melaksanakan urusan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa di Kota Bekasi;
- Melaksanakan urusan Bidang Politik Dalam Negeri di Kota Bekasi;
- Melaksanakan urusan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bekasi, dan
- Melaksanakan urusan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

### 2.1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi, dapat dilihat sebagai berikut :

**Gambar 2.1.2**  
**Struktur Organisasi Badan Kesbangpol Kota Bekasi**



Sumber : Perwal Kota Bekasi 129/2021, diolah Perencanaan.

### 2.1.3 Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi

Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP), mengacu terhadap Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Nomor : 800 / Kep. 108 – Kesbangpol Tanggal 15 Oktober 2018. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi memiliki beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP), beberapa diantaranya :

Tabel 2.1.3  
Standar Operasional Prosedur (SOP)

No	Nama SOP	Bidang Pengampu SOP
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
2	Pembinaan Bela Negara	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
3	Pembinaan Pembauran Kebangsaan	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
4	Bantuan Keuangan Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Bekasi	Bidang Politik Dalam Negeri
5	Rekomendasi Bantuan Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	Bidang Politik Dalam Negeri
6	Pengajuan Surat Pertimbangan Pendirian Rumah Ibadah	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
7	Pengajuan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Organisasi Kemasyarakatan	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
8	Penerbitan Surat Keterangan Laporan Orang Asing	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

**Sumber :** Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Nomor : 800 / Kep. 108 – Kesbangpol Tanggal 15 Oktober 2018

## 2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sangat didukung dengan adanya sumber daya yang harus dimiliki, bagian penting diantaranya adalah adanya sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung operasional organisasi. Adapun sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi sampai dengan disusunnya Rencana Strategis ini, dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data dari Bagian Umum dan Kepegawaian per Bulan September 2022, jumlah aparatur sebanyak 51 orang. Secara klasifikasi sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. **Klasifikasi Aparatur menurut jenis status kepegawaian**

**Tabel 2.2.1.a**

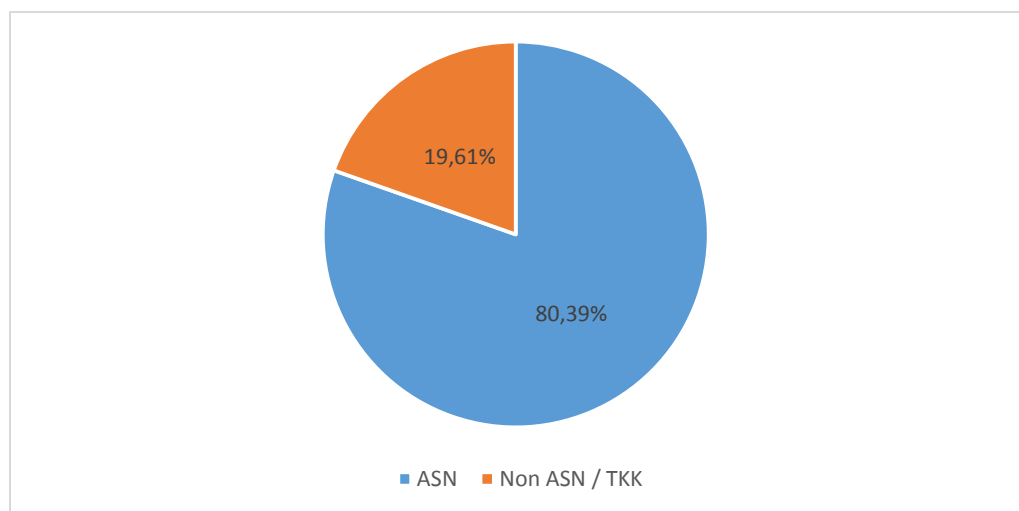
Klasifikasi Aparatur berdasarkan jenis status kepegawaian

No	Klasifikasi Aparatur berdasarkan Jenis Status Kepegawaian	Jumlah Aparatur berdasarkan Jenis Status Kepegawaian	Persentase
1	ASN	41 Orang	80,39 %
2	Non ASN / TKK	10 Orang	19,61 %
	<b>Jumlah Total Aparatur Kesbangpol</b>	<b>51 Orang</b>	<b>100,00 %</b>

*Sumber : Data Bag. Umum dan Kepegawaian, diolah Perencanaan*

**Gambar 2.2.1.a**

Pie Chart Aparatur berdasarkan jenis status kepegawaian



Dari data tabel dan gambar berdasarkan klasifikasi aparatur menurut jenis status kepegawaian diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Secara jenis status kepegawaian dari jumlah 51 orang aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi terdiri dari 41 orang Aparatur ASN dan 10 orang Aparatur Non ASN / TKK;
2. Berdasarkan analisa beban kerja dan pertimbangan kondisi kuantitas maupun kualitas, komposisi 41 orang aparatur ASN yang tersedia saat ini atau kondisi eksisting belum bisa dikatakan optimal dalam pelaksanaan operasionalisasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi, maka diperlukan adanya jasa tenaga pendukung Non ASN / TKK.



**b. Klasifikasi Aparatur menurut Gender**

**Tabel 2.2.1.b**  
Klasifikasi Aparatur berdasarkan Gender

No	Klasifikasi Aparatur berdasarkan Gender	Jumlah Aparatur berdasarkan Gender	Persentase
1	Laki - laki	35 Orang	68,63 %
2	Perempuan	16 Orang	31,37 %
	<b>Jumlah Total Aparatur Kesbangpol</b>	<b>51 Orang</b>	<b>100,00 %</b>

*Sumber : Data Bag. Umum dan Kepegawaian, diolah Perencanaan*

**Gambar 2.2.1.b**  
Pie Chart Aparatur berdasarkan Gender



Dari data tabel dan gambar berdasarkan klasifikasi aparatur menurut gender diatas, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan total keseluruhan jumlah aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi sebanyak 51 orang, diketahui 35 orang bergender laki – laki (68,63%) dan 16 orang bergender perempuan (31,37%).

Secara presentase gender aparatur di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi memang lebih didominasi oleh gender laki – laki pada saat Rencana Strategis 2024 – 2026 ini disusun, namun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terkait dengan partisipasi pembangunan Kota Bekasi akan memperhatikan pengarusutamaan gender.

c. **Klasifikasi Aparatur menurut Kelompok Usia**

**Tabel 2.2.1.c**

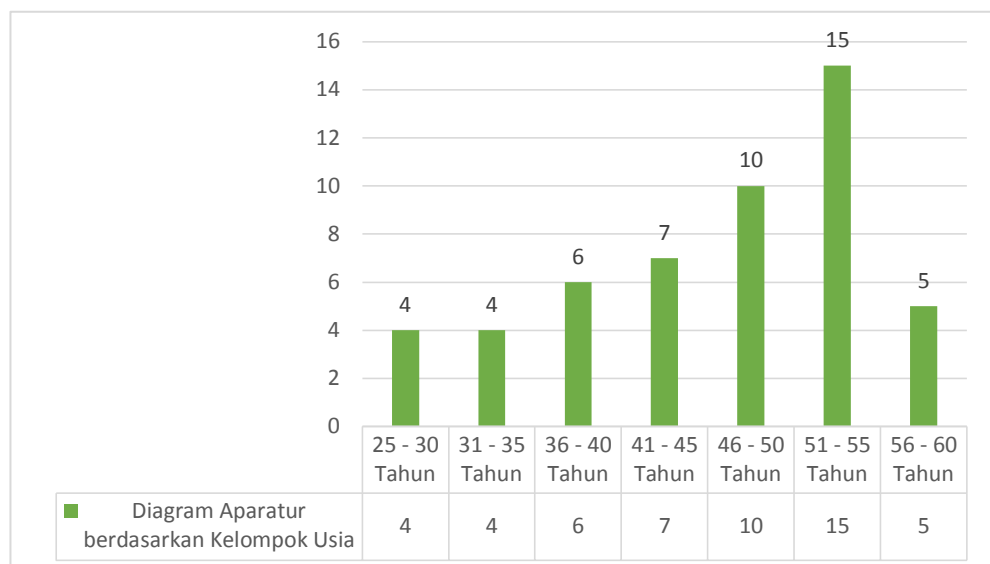
Klasifikasi Aparatur berdasarkan Kelompok Usia

No	Range Usia	Jumlah Aparatur berdasarkan Usia	Persentase
1	25 - 30 Tahun	4 Orang	7,84 %
2	31 - 35 Tahun	4 Orang	7,84 %
3	36 - 40 Tahun	6 Orang	11,76 %
4	41 - 45 Tahun	7 Orang	13,73 %
5	46 - 50 Tahun	10 Orang	19,61 %
6	51 - 55 Tahun	15 Orang	29,41 %
7	56 - 60 Tahun	5 Orang	9,80 %
	<b>Jumlah Total Aparatur Kesbangpol</b>	<b>51 Orang</b>	<b>100,00 %</b>

Sumber : Data Bag. Umum dan Kepegawaian, diolah Perencanaan

**Gambar 2.2.1.c**

Diagram Aparatur berdasarkan Kelompok Usia



Dari data tabel dan gambar berdasarkan klasifikasi aparaturnya menurut kelompok usia di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dari jumlah 51 orang aparaturnya berdasarkan pengklasifikasiannya range usia menjadi 7 kelompok, diketahui terdapat 2 range kelompok usia yang mendominasi yaitu range usia 51 – 55 tahun dengan perolehan presentase sebesar 29,41% dan range usia 46 – 50 tahun dengan perolehan presentase sebesar 13,73%;
2. Dari data poin 1 di atas terkait dengan klasifikasi aparaturnya berdasarkan kelompok usia dapat disimpulkan bahwa pada saat disusunnya Rencana

Strategis 2024 - 2026 ini, kelompok usia aparatur yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan organisasi perangkat daerah pemerintah Kota Bekasi yang didominasi kelompok usia diatas 46 tahun.

**d. Klasifikasi Aparatur menurut Pendidikan**

**Tabel 2.2.1.d**

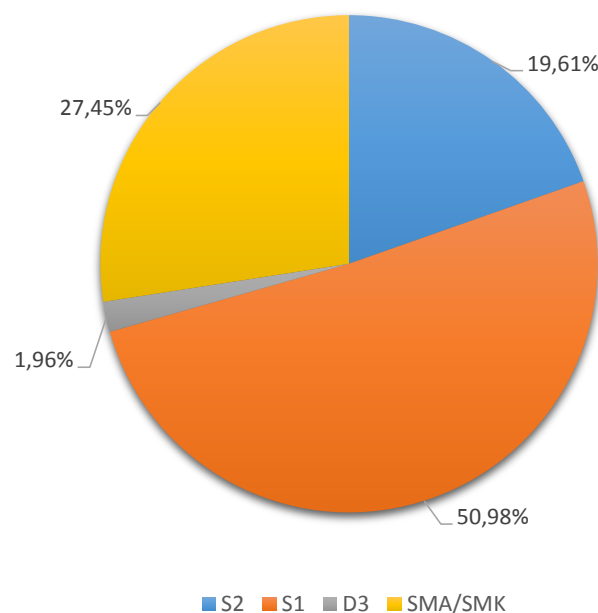
Klasifikasi Aparatur berdasarkan Pendidikan

No	Klasifikasi Aparatur berdasarkan Pendidikan	Jumlah Aparatur berdasarkan Pendidikan	Persentase
1	S3	- Orang	0,00 %
2	S2	10 Orang	19,61 %
3	S1	26 Orang	50,98 %
4	D3	1 Orang	1,96 %
5	SMA / SMK	14 Orang	27,45 %
6	SMP	- Orang	0,00 %
7	SD	- Orang	0,00 %
	<b>Jumlah Total Aparatur Kesbangpol</b>	<b>51 Orang</b>	<b>100,00 %</b>

*Sumber : Data Bag. Umum dan Kepegawaian, diolah Perencanaan*

**Gambar 2.2.1.d**

Pie Chart Aparatur berdasarkan Pendidikan



Dari data tabel dan gambar berdasarkan klasifikasi aparatur berdasarkan pendidikan diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

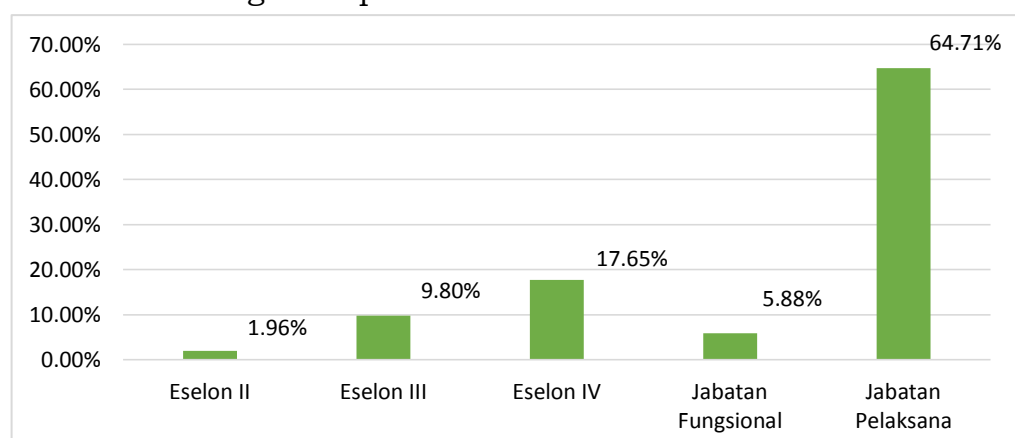
1. Klasifikasi aparatur berdasarkan pendidikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi pada saat Rencana Strategis 2024 – 2026 ini disusun, jenjang pendidikan paling tinggi adalah S.2 dan yang paling rendah adalah SMA/SMK;
2. Dari keseluruhan aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi yang berjumlah 51 orang, diketahui jenjang pendidikan S.1 sebanyak 26 orang dengan perolehan presentase sebesar 50,98%. Maka dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aparatur yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi secara akademis.

**e. Klasifikasi Aparatur berdasarkan Jabatan**

**Tabel 2.2.1.e**  
Klasifikasi Aparatur berdasarkan Jabatan

No	Klasifikasi Aparatur berdasarkan Jabatan	Jumlah Aparatur berdasarkan Jabatan	Persentase
1	Eselon II	1 Orang	1,96 %
2	Eselon III	5 Orang	9,80 %
3	Eselon IV	9 Orang	17,65 %
4	Jabatan Fungsional	3 Orang	5,88 %
5	Jabatan Pelaksana	33 Orang	64,71 %
	<b>Jumlah Total Aparatur Kesbangpol</b>	<b>51 Orang</b>	<b>100,00 %</b>

**Gambar 2.2.1.e**  
Diagram Aparatur berdasarkan Jabatan



Dari data tabel dan gambar berdasarkan klasifikasi aparatur berdasarkan jabatan diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dari jumlah keseluruhan aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi yang berjumlah 51 orang, berdasarkan struktur organisasi dan tata laksana kerja pada saat Rencana Strategis 2024 – 2026 ini disusun, terbagi menjadi 5 jenis klasifikasi aparatur berdasarkan jabatan, diantaranya : Eselon II selaku seorang Kepala Badan, Eselon III terdiri dari 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang, Eselon IV terdiri dari 1 (satu ) Kepala Bagian dan 8 (delapan) Kepala Sub Bidang, (3) Jabatan Fungsional terdiri dari : 1 (satu) Sub Koordinator Perencanaan, 1 (satu) Sub Koordinator Keuangan dan 1 (satu) Arsiparis, serta jabatan pelaksana yang terdiri dari aparatur ASN dan Non ASN / TKK yang berjumlah 33 orang;
2. Diketahui dari perolehan presentase capaian klasifikasi aparatur berdasarkan jabatan, persentase jabatan pelaksana memperoleh nilai paling tinggi yaitu sebesar 64,71%. Berdasarkan perolehan presentase tersebut dapat disimpulkan bahwa organisasi perangkat daerah tanpa adanya peranan jabatan pelaksana tidak dapat berjalan dengan baik dan optimal.

### **2.2.2 Sumber Daya Sarana Prasarana Pendukung Operasional Organisasi**

Selain dari pada Sumber Daya Manusia terdapat juga sumber daya lain dalam mendukung operasional organisasi perangkat daerah, yaitu sumber daya sarana dan prasarana. Adapun sumber daya sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud adalah adanya Aset atau modal, khususnya dalam penunjang urusan operasionalisasi perkantoran pada Organisasi Perangkat Daerah. Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi pada saat Rencana Strategis 2024 – 2026 ini disusun, data

sarana dan prasarana aset atau modal penunjang operasional dapat dilihat penjelasannya sebagai berikut :

**Tabel 2.2.2**  
**Aset / Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi**

No	Jenis Aset / Modal	Jumlah	Keterangan
1.	Komputer	18 Unit	6 Unit, Rusak Berat
2.	Laptop	12 Unit	4 Unit, Rusak
3.	Printer	16 Unit	1 Rusak
4.	Proyektor / Infocus	1 Unit	Kondisi Baik
5.	Kendaraan Operasional		
	a. Roda 4 (Mobil)	6 Unit	Kondisi Baik
	b. Roda 2 (Sepeda Motor)	12 Unit	1 unit, Rusak Berat

**Sumber :** KIB-B Data Bag. Umum dan Kepegawaian, diolah Perencanaan

Berdasarkan data tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Data Aset / Modal yang disajikan pada tabel merupakan sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasionalisasi perkantoran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi;
2. Terkait dengan sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung seperti : Komputer, Laptop dan Printer diketahui bahwa dari jumlah ketersediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud, apabila dihitung dengan komposisi aparatur yang berjumlah 51 orang. Maka, dapat disimpulkan bahwa belum sepenuhnya kegiatan operasionalisasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi yang bersifat administrasi perkantoran yang menggunakan komputer, laptop dan printer berjalan secara optimal dikarenakan adanya keterbatasan sarana dan prasarana.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2018 - 2023**

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu Sub Kegiatan/Kegiatan/Program dalam mewujudkan sasaran, tujuan organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Sementara pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut ini merupakan Tujuan dan Sasaran yang diampu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi periode 2018 – 2023 :

**Tabel 2.3.1**  
**Tujuan dan Sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kota Bekasi, Periode : 2018 - 2023**

<b>Sebelum Perubahan RPJMD Kota Bekasi</b>										
<b>Periode : 2018 – 2020</b>										
NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DATA EXISTING	TARGET Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke -				
						1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Mewujudkan toleransi antar umat beragama	Indeks Toleransi	Terwujudnya toleransi antar umat beragama	Persentase kasus perselisihan antar umat beragama yang diselesaikan	-	100%	100%	-	-	-
2	Mewujudkan masyarakat Kota Bekasi yang Berwawasan Kebangsaan	Indeks Toleransi	Terwujudnya masyarakat Kota Bekasi yang Berwawasan Kebangsaan	Persentase kasus perselisihan suku bangsa, ras dan antar golongan yang diselesaikan	-	100%	100%	-	-	-
3	Mewujudkan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Nilai AKIP Kesbangpol	Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Nilai AKIP Kesbangpol	-	Cc	Cc	-	-	-
<b>Setelah Penyesuaian terhadap Perubahan RPJMD Kota Bekasi</b>										
<b>Periode : 2021 – 2023</b>										
NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DATA EXISTING	TARGET Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke -				
						1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Mewujudkan kerukunan, toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi	Presentase Penurunan Konflik SARA dan Politik	Terwujudnya kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	Indeks Toleransi	5,530	-	-	5.971	5.998	6.025
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi	persentase partisipasi masyarakat dalam politik	0.12 %	-	-	0.13%	0.14 %	0.15 %
			Meningkatnya peran serta ormas dalam pembangunan	Persentase ormas yang berperan aktif dalam pembangunan daerah	51.4 %	-	-	64.2 %	77.1 %	90 %
2	Mewujudkan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Nilai AKIP Kesbangpol	Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Nilai AKIP Kesbangpol	Cc	-	-	Bb	Bb	Bb

**Sumber :** Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi tahun 2018-2023

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021, terdapat adanya beberapa perubahan terkait dengan Tujuan dan Sasaran beserta substansinya yang menjadi urusan langsung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi. Hal tersebut dikarenakan adanya penyesuaian terhadap RPJMD Kota Bekasi 2018 – 2023 akibat dari pandemi COVID – 19 dan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah beserta substansinya di Kota Bekasi.

Dalam penyusunan Rencana Strategis 2024 – 2026 ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi perlu menyandingkan data capaian kinerja pada periode sebelumnya. Berikut ini merupakan data capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi tahun 2018 – 2023, adapun penjelasan sebagai berikut :



**Tabel 2.3.2 (T-C.23)  
Realisasi Capaian Kinerja Badan Kesbangpol 2018 - 2022**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	<b>Tahun 2019 - 2020 (Renstra Murni / Sebelum Perubahan)</b>																		
1	Tujuan 1 : <i>"Mewujudkan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi"</i>																		
	Indikator : <b>Nilai AKIP Kesbangpol</b>	-	-	-	Cc	Cc	-	-	-	Cc	Bb	-	-	-	Bb	Bb	-	-	-
	Sasaran : <i>"Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi" :</i>																		
	Indikator : <b>Nilai AKIP Kesbangpol</b>	-	-	-	Cc	Cc	-	-	-	Bb	Bb	-	-	-	Bb	Bb	-	-	-
1	Program : <i>"Program Pelayanan Administrasi Perkantoran" :</i>																		
	Indikator : <b>Persentase optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran</b>	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2	Program : "Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur"																		
	Indikator : <b>Persentase optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-
3	Program : "Program Peningkatan Disiplin Aparatur"																		
	Indikator : <b>Persentase optimalisasi peningkatan disiplin aparatur</b>	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-
4	Program : "Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur"																		
	Indikator : <b>Persentase optimalisasi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-	0%	0%	-	-	-	0%	0%	-	-	-

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5	Program : "Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan" :																		
	Indikator : <b>Persentase optimalisasi peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	-	-	-	100 %	-	-	-	-	100 %	-	-	-	100 %	-	-	-	-	-
2	Tujuan 2 : "Mewujudkan Toleransi antar Umat Beragama"																		
	Indikator : <b>Index Toleransi</b>	-	-	-	5,91 7	5,94 4	-	-	-	-	5,53	-	-	-	-	93%	-	-	-
	Sasaran : "Terwujudnya Toleransi antar Umat Beragama"																		
	Indikator : <b>Persentase kasus perselisihan antar umat beragama yang diselesaikan</b>	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Program : "Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan"																		
	Indikator : <b>Persentase Penyelesaian Masalah Keagamaan</b>	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-
3	Tujuan 3 : "Mewujudkan Masyarakat Kota Bekasi yang Berwawasan Kebangsaan"																		
	Indikator : <b>Persentase Kasus perselisihan antar suku bangsa, ras dan antar golongan yang terselesaikan</b>	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-
	Sasaran : "Terwujudnya Masyarakat Kota Bekasi yang Berwawasan Kebangsaan":																		
	Indikator : <b>Persentase Kasus Peselisihan Suku Bangsa, Ras dan antar golongan yang diselesaikan</b>	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Program : "Program <i>Pengelolaan Pemerintahan Umum</i> "																		
1	Indikator 1 : <b>Persentase Penyelesaian Konflik yang disebabkan oleh Suku, Ras dan Antar Golongan/Etnis</b>	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-
2	Indikator 2 : <b>Persentase Peningkatan pembinaan politik daerah</b>	-	-	-	3%	5%	-	-	-	3%	5%	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-
	<b>Tahun 2021-2023</b> (Renstra Perubahan / Setelah Perubahan)																		
1	Tujuan 1 : "Mewujudkan <i>Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi</i> "																		
	Indikator : <b>Nilai AKIP Kesbangpol</b>	-	-	-	-	-	Bb	Bb	Bb	-	-	Bb	Bb	Bb	-	-	Bb	Bb	Bb

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Sasaran : "Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi" :																		
	Indikator : <b>Nilai AKIP Kesbangpol</b>	-	-	-	-	-	Bb	Bb	Bb	-	-	Bb	Bb	Bb	-	-	Bb	Bb	Bb
1	Program : "Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota" :																		
	Indikator 1 : <b>Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%
	Indikator 2 : <b>Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Indikator 3 :  <b>Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%
	Indikator 4 :  <b>Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%
2	Tujuan 2 : "Mewujudkan kerukunan, toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi"																		
	1 Indikator 1 : <b>Index Toleransi</b>	-	-	-	-	-	5,971	5,998	6,025	-	-	5,830	6,080	6,460	-	-	97,63 %	101,36 %	107,21 %
	Sasaran : "Terwujudnya kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat"																		

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Indikator : <b>Persentase Kasus Perselisihan SARA yang diselesaikan</b>	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%
	Program : <i>"Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan"</i>																		
	Indikator : <b>Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	-	-	-	-	-	15%	30%	50%	-	-	15%	30%	50%	-	-	100%	100%	100%
	Program : <i>"Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya"</i>																		
	Indikator : <b>Cakupan Masyarakat yang mendapat pembinaan peningkatan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya</b>	-	-	-	-	-	0,15%	0,17%	0,18%	-	-	0,15%	0,17%	0,18%	-	-	100%	100%	100%



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-						
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
	Program :  "Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik"																				
	Indikator :  <b>Persentase penanganan konflik yang disebabkan oleh suku, ras dan antar golongan</b>	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%		
2	Indikator 2 :  <b>Persentase demokrasi dalam pembangunan masyarakat</b>	-	-	-	-	-	9,42 %	12,04 %	14,66 %	-	-	9,42 %	12,04 %	14,66 %	-	-	100 %	100 %	100 %		
	Sasaran :  "Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi"																				
	Indikator :  <b>Persentase partisipasi masyarakat dalam politik</b>	-	-	-	-	-	54,37 %	58,56 %	88,56 %	-	-	54,37 %	58,56 %	88,56 %	-	-	100 %	100 %	100 %		

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Program : "Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik"																		
	Indikator :  <b>Persentase Peningkatan Pembinaan Politik Daerah</b>	-	-	-	-	-	5%	5%	5%	-	-	5%	5%	5%	-	-	100%	100%	100%
	Program : "Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan"																		
	Indikator :  <b>Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang dibina</b>	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%

Sumber : Data LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi 2019 – 2021, diolah Perencanaan

Dari data realisasi capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2018 – 2023 diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan kinerja pada periode 2018 – 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi terdapat beberapa kali penyesuaian terhadap substansi dari tujuan, sasaran dan program yang diampu dikarenakan adanya perubahan RPJMD Pemerintah Kota Bekasi terkait pandemi COVID - 19 dan adanya implementasi Peraturan dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta substansinya, sehingga terdapat perubahan-perubahan dalam rangka substansi Tujuan, Sasaran, Nomenklatur Program beserta substansi lainnya yang harus dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi di tahun 2021 - 2023;
2. Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2018 - 2023, dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.3.3  
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi  
Tahun 2018 - 2023

No	Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi	Target					Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	<b>Renstra Murni Tahun 2018 - 2020</b>  Persentase Kasus Peselisihan Suku Bangsa, Ras dan antar golongan yang diselesaikan	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
2	<b>Renstra Perubahan Tahun 2021 - 2023</b>  Persentase Kasus Perselisihan SARA yang diselesaikan	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%

3. Dapat disimpulkan bahwa terkait capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dalam mendukung serta mensukseskan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih periode tahun 2019 – 2023 sudah cukup baik.

## **2.4 Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023**

Berdasarkan hasil realisasi anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.4.1(T-C.24)**  
**Realisasi Anggaran Badan Kesbangpol 2018 – 2022**

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -				Rata-rata Pertumbuhan	
		(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	Nilai Akhir Periode	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	Nilai Akhir Periode	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19
<b>A</b>	<b>Belanja Operasi</b>	11.273.588.260	10.046.743.300	16.403.834.950	24.634.211.635	62.358.378.145	9.049.152.864	9.369.189.395	15.606.382.922	19.861.451.947	53.886.177.128	<b>80,27</b>	<b>93,26</b>	<b>95,14</b>	<b>80,63</b>	<b>34,19</b>	<b>32,46</b>
1	Belanja Pegawai	9.069.035.000	8.605.918.300	9.025.862.000	9.090.250.000	35.791.065.300	7.806.836.289	8.009.527.976	8.653.708.114	8.500.715.974	32.970.788.353	86,08	93,07	95,88	93,51	0,16	2,96
2	Belanja Barang dan Jasa	2.204.553.260	1.440.825.000	3.134.651.950	7.150.640.635	13.930.670.845	1.242.316.575	1.359.661.419	2.709.353.808	3.395.925.646	8.707.257.448	56,35	94,37	86,43	47,49	70,34	44,68
3	Belanja Hibah	-	-	4.243.321.000	8.393.321.000	12.636.642.000	-	-	4.243.321.000	7.964.810.327	12.208.131.327	-	-	100,00	94,89	97,80	0
<b>B</b>	<b>Belanja Modal</b>	32.642.740	-	36.500.000	33.337.000	102.479.740	-	-	36.500.000	32.225.000	68.725.000	-	-	<b>100,00</b>	<b>96,66</b>	<b>1,58</b>	<b>-11,71</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11.306.231.000</b>	<b>10.046.743.300</b>	<b>16.440.334.950</b>	<b>24.667.548.635</b>	<b>62.460.857.885</b>	<b>9.049.152.864</b>	<b>9.369.189.395</b>	<b>15.642.882.922</b>	<b>19.893.676.947</b>	<b>53.954.902.128</b>	<b>80,04</b>	<b>93,26</b>	<b>95,15</b>	<b>80,65</b>	<b>34,18</b>	<b>32,56</b>

**Sumber** : Data laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi periode : 2019-2022, diolah Perencanaan

Dari data tabel Realisasi Anggaran diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi jenis Belanja, diantaranya : **(a) Belanja Operasi**, yang terdiri dari : 1. *Belanja Pegawai*, 2. *Belanja Barang dan Jasa*, 3. *Belanja Subsidi*, 4. *Belanja Hibah*, dan 5. *Belanja Bantuan Sosial*. **(b) Belanja Modal**, **(c) Belanja Tidak Terduga**, serta **(d) Belanja Transfer**;
2. Realisasi Anggaran sebagaimana yang ditampilkan pada tabel diatas merupakan data yang bersumber dari data rancangan awal Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 – 2026 (penyusunan tahun 2022), sehingga data realiasasi anggaran tahun 2023 tidak tersedia;
3. Sumber pendanaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi tahun 2019 – 2022 menggunakan dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) dan Dana Bagi Hasil Provinsi (DBHP);
4. Berdasarkan sebagaimana yang tercantum pada poin 1 - 3 diatas dapat disampaikan sebagai berikut :

**Tahun 2019 :**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi memperoleh Pagu Anggaran sebesar Rp. 11.306.231.000,- dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 9.049.152.864,- atau memperoleh capaian prosentase sebesar 80,04%. Dari data tersebut diketahui terdapat gap angka sebesar Rp. 2.257.078.136,- (19,96%) yang tidak terserap, hal tersebut dikarenakan pada tahun ini Pemerintah Kota Bekasi menerapkan suatu kebijakan dalam rangka efisiensi anggaran untuk setiap organisasi perangkat daerah dilingkup Pemerintah Kota Bekasi;

**Tahun 2020 :**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi memperoleh Pagu Anggaran sebesar Rp. 10.046.743.300,- dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 9.369.189.395,- atau memperoleh capaian prosentase sebesar 93,26%. Dari data tersebut diketahui terdapat gap angka sebesar Rp. 677.553.905,- (6,74%) yang tidak terserap, hal tersebut dikarenakan pada tahun ini beberapa pelaksanaan kegiatan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi terkendala akibat adanya pandemi COVID - 19;

**Tahun 2021 :**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi memperoleh Pagu Anggaran sebesar Rp. 16.440.334.950,- dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 15.642.882.992,- atau memperoleh capaian prosentase sebesar 95,15%. Dari data tersebut diketahui terdapat gap angka sebesar Rp. 797.452.028,- (4,85%) yang tidak terserap, hal tersebut dikarenakan pada tahun ini beberapa pelaksanaan kegiatan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi masih terkendala akibat masih berlangsungnya pandemi COVID - 19 di Kota Bekasi;

**Tahun 2022 :**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi memperoleh Pagu Anggaran sebesar Rp. 24.667.548.635,- dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 19.893.676.947,- atau memperoleh capaian prosentase sebesar 80,65%. Dari data tersebut diketahui terdapat gap angka sebesar Rp. 4.773.871.688,- (19,45%) yang tidak terserap, hal tersebut dikarenakan pada tahun ini terdapat pelaksanaan pembatasan penyerapan anggaran di lingkup Pemerintah Kota Bekasi;

5. Dari penjelasan sebagaimana tercantum pada poin 4 (empat) diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam rangka capaian realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sudah cukup baik, hal tersebut terlihat dari nilai prosentase progresif capaian realisasi anggaran yang meningkat dan juga terlihat penurunan atau regresif dari nilai prosentse gap anggaran yang tidak terserap setiap tahunnya.

## 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak terlepas dari unsur pelayanan yang harus diberikan oleh perangkat organisasi daerah untuk memberikan kontribusi dalam rangka pembangunan daerahnya, begitu juga dengan Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Bekasi.

Dalam memberikan pelayanan baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat di Kota Bekasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan selalu menemui adanya Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

**Tabel 2.5.1**  
**Tantangan dan Peluang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi**

<b>TANTANGAN</b>	
<b>Internal</b>	<b>Eksternal</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Aparatur;</li> <li>2. Paradigma subjektif terhadap peranan tugas dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Demografi dan karakteristik masyarakat yang heterogen yang tidak terlepas dari unsur SARA di Kota Bekasi;</li> <li>2. Situasi dan Kondisi Politik Daerah, pra dan pasca Pemilu dan Pilkada di Kota Bekasi;</li> <li>3. Globalisasi dan Kemajuan Teknologi yang dinamis;</li> </ol>



<b>PELUANG</b>	
<b>Internal</b>	<b>Eksternal</b>
<p>1. Masih tersedianya perolehan APBD dalam rangka melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah;</p> <p>2. Masih terfasilitasinya sarana dan prasarana dalam melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah.</p>	<p>1. Tersedianya Peraturan yang mengatur tentang peranan, tugas dan fungsi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik (UU.23/2014, Permendagri No. 11 / 2019, Permendagri No.90/2019 dan substansi yang lainnya);</p> <p>2. Tersedianya Forum Masyarakat yang mendukung peranan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Bekasi, diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);</li> <li>- Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);</li> <li>- Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).</li> </ul> <p>3. Tersedianya lembaga bentukan Pemerintah yang menunjang peranan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi, diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan</li> <li>- Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU).</li> </ul> <p>4. Adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, indikator diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya Organisasi Kemasyarakatan;</li> <li>- Adanya masyarakat sebagai anggota dan pengurus partai politik;</li> <li>- Prosentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada di Kota Bekasi (Data BAWASLU).</li> </ul>

**Sumber :** Berita Acara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Nomor : 050.3 / 3893 - Kesbangpol.Set tanggal 29 September 2022

### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Kota Bekasi merupakan daerah dengan karakteristik masyarakat heterogen. Secara demografi, unsur penduduk Kota Bekasi tidak pernah akan terpisahkan dari perbedaan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA). Berdasarkan data kepadatan penduduk Kota Bekasi dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**  
**Kota Bekasi Tahun 2021**

Kelompok Umur (range usia)	Jenis Kelamin (Gender)		Jumlah Penduduk Kota Bekasi berdasarkan Kelompok Usia (Orang)
	Laki - laki (Orang)	Perempuan (Orang)	
0 - 4	102.437	96.983	199.420
5 - 9	97.919	93.684	191.603
10 - 14	105.755	99.419	205.174
15 - 19	103.719	97.328	201.047
20 - 24	104.878	102.691	207.569
25 - 29	111.627	112.297	223.924
30 - 34	115.026	114.752	229.778
35 - 39	107.821	106.682	214.503
40 - 44	100.907	101.341	202.248
45 - 49	87.992	89.089	177.081
50 - 54	77.892	80.293	158.185
55 - 59	64.898	68.966	133.864
60 - 64	50.421	49.973	100.394
65 - 69	34.456	31.707	66.163
70 - 74	16.284	15.543	31.827
75+	9.950	12.211	22.161
<b>Total Penduduk Kota Bekasi Tahun 2021</b>	<b>1.291.982</b>	<b>1.272.959</b>	<b>2.564.941</b>

*Sumber : Data Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, Kota Bekasi Dalam Angka 2022. Diolah Perencanaan*

Dengan adanya perbedaan SARA dan total jumlah kepadatan penduduk Kota Bekasi tersebut, tentu adanya potensi kerawanan konflik dimasyarakat Kota Bekasi terkait dengan SARA cukup tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi yang melaksanakan tugas dan fungsi kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Bekasi perlu untuk merumuskan Identifikasi permasalahan dan isu – isu strategis.

Identifikasi permasalahan dan isu – isu strategis merupakan tahapan kompleks dan krusial dalam tahapan penyusunan Rencana Strategis. Dalam rangka pengidentifikasian permasalahan pentingnya dipetakan Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi pada periode sebelumnya. Adapun maksud dan tujuan dari pemetaan dari permasalahan yang ada dalam penyusunan Rencana Strategis ini, merupakan penentuan isu – isu strategis yang nantinya menjadi fokus tujuan dan sasaran dalam melaksanakan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi tahun 2024 – 2026.

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat Indonesia pada umumnya dan Pemerintah Kota Bekasi pada khususnya, maka pemetaan masalah - masalah yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi berdasarkan tugas, pokok dan fungsi dalam 3 (tiga) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan dalam penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Bekasi**

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Persentase partisipasi masyarakat kota bekasi di dalam pemilukada lebih rendah dibandingkan dengan pemilihan presiden	Ketersediaan dana Pemilu dan Pemilukada terbatas	Kebutuhan Anggaran Pelaksanaan Pemilu di Kota Bekasi
		Kurangnya sosialisasi, pilihan politik tidak menarik, masyarakat apatis politik	Model sosialisasi masih menggunakan cara konvensional
			Perubahan cara pandang masyarakat kepada proses politik (apatis)
2	Kerawanan sosial yang timbul akibat dinamika sosial di daerah	Kondusifitas Politik Daerah (Money Politik, Kampanye Hitam, Kampanye tidak sesuai dengan jadwal, Kampanye mengikutsertakan anak-anak)	Kerawanan situasi kondisi Politik Daerah
		Gesekan Masa Parpol dan Politik Identitas	Polarisasi (Keterpecahan) Masyarakat karena pilihan politik

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
3	Kuranginya pembinaan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan, kerukunan beragama	Konflik pendirian rumah ibadah, Aktifitas aliran agama dan kepercayaan mengganggu trantibum, proxy agama	Kerukunan Beragama
		Proxy suku, ras dan antar golongan, sukuisme	Kesatuan Bangsa
		Politik identitas dan populisme politik	Potensi konflik yang timbul dari Politik Demokrasi
		Organisasi Kemasyarakatan tidak berfungsi sebagaimana fungsinya	Adanya kepentingan yang terjadi di antara kelompok masyarakat yang dapat memicu potensi konflik

*Sumber : Berita Acara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Nomor : 050.3 / 3893 - Kesbangpol.Set tanggal 29 September 2022*

### 3.2 Isu – Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi

Dengan akan berakhirnya periode RPJMD 2018 – 2024 Kota Bekasi, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi perlu melakukan perumusan ulang terkait keberlanjutan Rencana Strategis Badan melalui perumusan ulang isu – isu strategis yang akan dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi. Adapun isu – isu strategis tersebut, diantaranya :

1. Proses pelaksanaan pemilu serentak 2024 terkait dengan Tim Desk Pemilu, Dana Hibah pelaksanaan Pemilu, partisipasi masyarakat dalam pemilu, serta polarisasi masyarakat yang akan muncul akibat pelaksanaan pemilu;
2. Isu Toleransi, kesatuan bangsa dan potensi konflik dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, mengingat pada tahun 2023 – 2024 belum adanya Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih di Kota Bekasi, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memperhatikan dan mengacu terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Bekasi tahun 2024 – 2026. Adapun Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026 dapat dilihat sebagai berikut :

**Gambar 4**  
**Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD)**  
**Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024 - 2026**



**Sumber :** Rancangan Akhir RPD Kota Bekasi Tahun 2024 - 2026

Dari gambar diatas dapat diketahui, terdapat 5 (Lima) Tujuan dalam rancangan Akhir RPD Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026. Berpedoman terhadap Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Bekasi tersebut, maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi memiliki daya ungkit pendukung terhadap 2 (Dua) Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Bekasi periode tahun 2024 – 2026. Pertama adalah Tujuan ke – 1, yaitu : **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel”** dan Tujuan ke – 2, yaitu : **“Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman”**.

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi 2024 – 2026

Dalam menentukan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi tahun 2024 – 2026 tentu memiliki Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka mensukseskan pembangunan Kota Bekasi. Adapun Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi, sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi 2024 - 2026**

TUJUAN	SASARAN
1. Merawat persatuan dan kesatuan masyarakat dengan mengembangkan aspek demokrasi, kebangsaan dan kerukunan serta keberagaman.	Terwujudnya kerukunan, toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi.
2. Mewujudkan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi	Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi

*Sumber : Berita Acara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Nomor : 050.3 / 3893 - Kesbangpol.Set tanggal 29 September 2022*

#### 4.2 Proyeksi Cascading Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026.

Berdasarkan proyeksi cascading kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dapat dijelaskan bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis Perubahan Tahun 2024 -2026 ini. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi melaksanakan 2 Tujuan, 2 Sasaran, dan 6 Program dalam rangka mensukseskan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026. Adapun proyeksi cascading kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dapat dilihat pada bagian lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen rencana strategis perubahan tahun 2024 – 2026 ini.

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan adalah rumusan perencanaan komprehensif dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien. Strategi merupakan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, demi tercapainya tujuan dan sasaran Badan Kesatuan dan Politik Kota Bekasi tahun 2024 - 2026 diperlukan penentuan strategi yang diterjemahkan secara bertahap ke dalam arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan adalah prioritas layanan yang harus diselenggarakan, sebagai bentuk upaya dalam mencapai tujuan. Dengan demikian, strategi merupakan program - program indikatif dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi. Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi tahun 2024 - 2026, sebagai berikut :

**Tabel 5**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Periode 2024 - 2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Merawat persatuan dan kesatuan masyarakat dengan mengembangkan aspek demokrasi, kebangsaan dan kerukunan serta keberagaman.	Terwujudnya kerukunan, toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;</li> <li>2. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;</li> <li>3. Peningkatann Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;</li> <li>4. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi Pendidikan Politik bagi masyarakat Kota Bekasi;</li> <li>2. Fasilitasi bantuan keuangan bagi anggota parpol di Kota Bekasi;</li> <li>3. Fasilitasi bantuan dana hibah bagi lembaga pemerintah (KPU dan BAWASLU) di Kota Bekasi;</li> <li>4. Fasilitasi bantuan dana hibah bagi Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bekasi;</li> <li>5. Fasilitasi legalitas Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bekasi;</li> </ol>

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			<p>5. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.</p>	<p>6. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bekasi;</p> <p>7. Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;</p> <p>8. Fasilitasi Tim Kewaspadaan Dini Daerah di Kota Bekasi (FKDM, TNI, POLRI, BINDA, KEJAKSAAN, IMIGRASI, dll);</p> <p>9. Fasilitasi legalitas Surat Keterangan Laport Orang Asing di Kota Bekasi;</p> <p>10. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan perundang - undangan terkait Kewaspadaan Dini Daerah di Kota Bekasi;</p> <p>11. Fasilitasi Sinergitas tokoh masyarakat Kota Bekasi dengan pemerintah daerah;</p> <p>12. Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi;</p> <p>13. Fasilitasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi;</p> <p>14. Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kota Bekasi;</p>



NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				<p>15. Fasilitasi Legalitas Penerbitan Pertimbangan Rumah Ibadah di Kota Bekasi;</p> <p>16. Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kota Bekasi;</p> <p>17. Fasilitasi Pendidikan Bela Negara di Kota Bekasi;</p> <p>18. Fasilitasi Pendidikan Konsepsi Wawasan Kebangsaan di Kota Bekasi;</p> <p>19. Fasilitasi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Bekasi.</p>
2	Mewujudkan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi	Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Menunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam Substansi Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	<p>1. Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;</p> <p>2. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran;</p> <p>3. Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;</p> <p>4. Optimalisasi Peningkatan Sarana Prasarana</p>

**Sumber :** Berita Acara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Nomor : 050.3 / 3893 – Kesbangpol.Set tanggal 29 September 2022

**BAB VI**

**RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SERTA  
PENDANAAN**

Berdasarkan setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah beserta substansinya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dalam pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2024 – 2026 mengampu terhadap Program / Kegiatan / Sub Kegiatan sebagaimana berikut :

**Tabel 6**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi 2024 - 2026**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;</li> <li>2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;</li> <li>3. Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka;</li> <li>4. Pembentukan Paskibraka.</li> </ol>
2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
3	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;</li> </ol>

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			<p>2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;</p> <p>3. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota.</p>
4	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	<p>1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;</p> <p>2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;</p> <p>3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.</p>
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi	1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Kemasyarakatan	Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah; 2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD.
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan; 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; 3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor; 2. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan; 3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; 4. Fasilitasi Kunjungan Tamu; 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; 6. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;</li> <li>2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;</li> <li>3. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</li> </ol>

Dari data diatas dapat diketahui bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mensukseskan Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Bekasi tahun 2024 - 2026, akan melaksanakan 6 Program, 12 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan berdasarkan Klasifikasi, Kodefikas dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta substansinya.

### 6.1 Pendanaan Indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2024 - 2026

Dalam mensukseskan Rencana Pembangunan Daerah sangat diperlukan adanya anggaran dalam menunjang peranan tugas dan fungsi bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah pada umumnya, begitu juga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi. Adapun Pogram, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi untuk periode tahun 2024 – 2026, dapat dilihat pada bagian lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi tahun 2024 – 2026 ini.

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan adalah ringkasan dari Indikator Kinerja oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi yang telah dijabarkan dari pembahasan pada bab – bab sebelumnya. Dimana kinerja ini merupakan instrumen yang paling substansi atas keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan yang menjadi tugas dan fungsi.

Selain itu juga instrumen ini sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dari Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dalam rangka memperbaiki kelemahan dan menyelesaikan permasalahan dimasa yang akan datang. Adapun Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dalam mensukseskan Tema dalam Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Bekasi tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 7**  
**Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi**  
**Tahun 2024 - 2026**

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Target Kinerja		
		2024	2025	2026
<b>Tujuan :</b> Merawat Persatuan dan Kesatuan Masyarakat dengan mengembangkan aspek demokrasi, kebangsaan dan kerukunan serta keberagaman	Persentase pembinaan Persatuan dan Kesatuan dengan mengembangkan aspek demokrasi, kebangsaan dan kerukunan serta keberagaman bagi masyarakat yang dilaksanakan Kesbangpol Kota Bekasi	100 %	100 %	100 %
<b>Sasaran :</b> Terwujudnya kerukunan, toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi	Persentase Kasus SARA yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
<b>Program 1 :</b> PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Optimalisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	100 %	100 %
<b>Program 2 :</b> PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Optimalisasi Pembinaan Politik Daerah	100 %	100 %	100 %
<b>Program 3 :</b> PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Optimalisasi Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	100 %	100 %	100 %
<b>Program 4 :</b> PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Optimalisasi pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %	100 %	100 %
<b>Program 5 :</b> PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Optimalisasi Penanganan Potensi Konflik Daerah	100 %	100 %	100 %

**Sumber :** Berita Acara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Nomor : 050.3 / 3893 – Kesbangpol.Set tanggal 29 September 2022

## BAB VIII PENUTUP

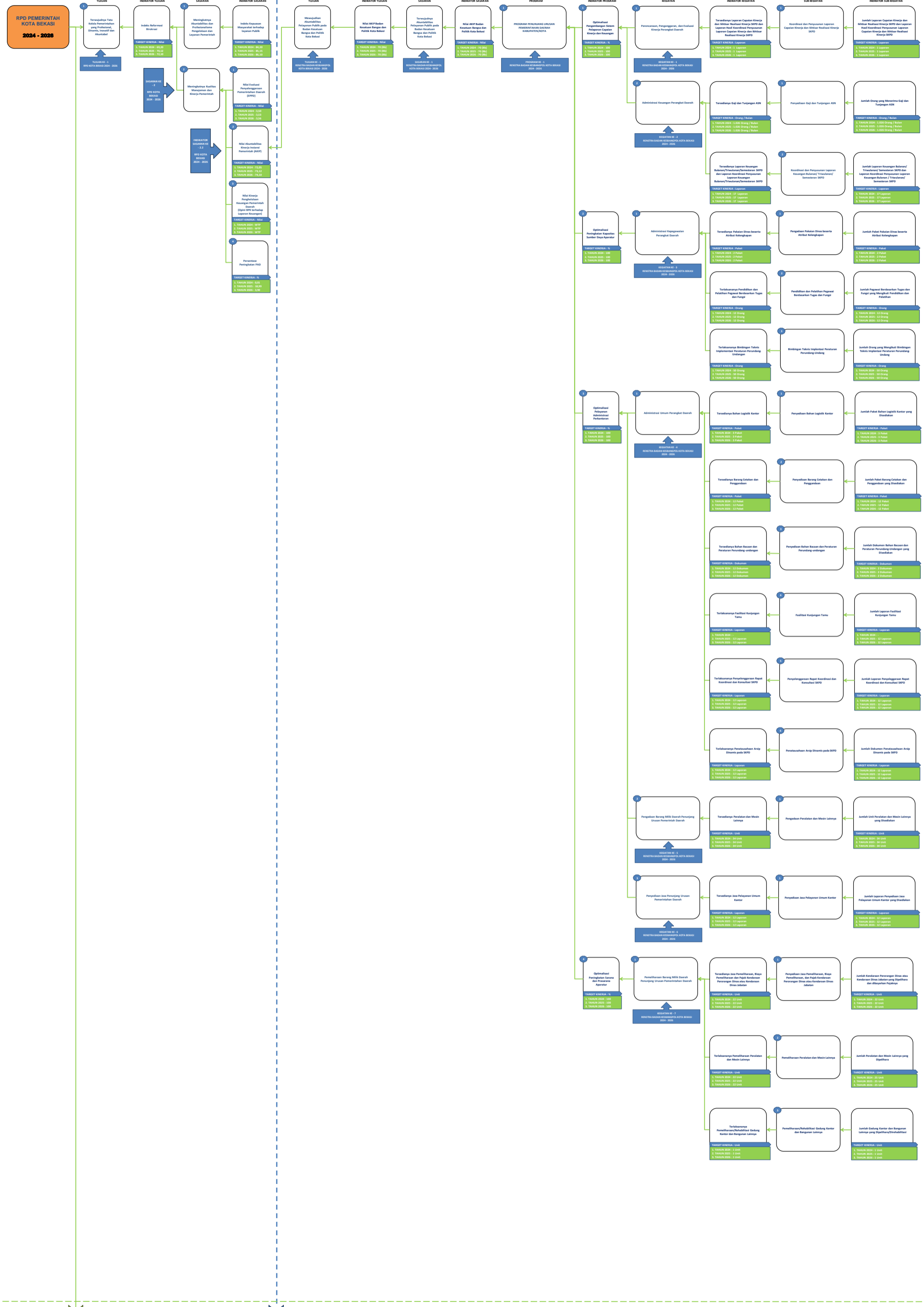
Demikianlah rencana strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi 2024 - 2026 ini disusun sebagai bahan rujukan dalam penetapan kebijakan dan perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, yang dijadikan sebagai dokumen perencanaan yang bersifat strategis. Rencana Strategis ini tetap terbuka untuk langkah - langkah penyempurnaan dan penyesuaian, sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi daerah dan kebijakan pemerintahan nantinya.

Bekasi, Februari 2024  
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA BEKASI**

  
**NESAN SUJANA, S.T., M.T.,CGCAE**

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**  
**Rencana Strategis Perubahan**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kota Bekasi Tahun 2024 - 2026**







**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2024-2026**

Dasar : Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tahun 2023)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung-jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
1 Merawat Persatuan dan Kesatuan Masyarakat dengan mengembangkan aspek demokrasi, kebangsaan dan kerukunan serta keberagaman	1.1 Terwujudnya kerukunan, toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi	8 01 002	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Optimalisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	Rp2,290,812,860	100%	Rp2,796,130,000	100%	Rp896,130,000	100%	Rp4,083,072,860	Badan Kesbangpol	Kota Bekasi, Jawa Barat		
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah	-	1.620 Orang	Rp2,290,812,860	220 Orang	Rp896,130,000	220 Orang	Rp896,130,000	2.060 Orang	Rp4,083,072,860		
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	1.620 Orang	Rp2,290,812,860	220 Orang	Rp896,130,000	220 Orang	Rp896,130,000	2.060 Orang	Rp4,083,072,860			
					2	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	-	-	862 Orang	Rp580,940,700	862 Orang	Rp580,940,700	1.724 Orang	Rp1,161,881,400		
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	-	-	862 Orang	Rp580,940,700	862 Orang	Rp580,940,700	1.724 Orang	Rp1,161,881,400			
					3	Terlaksananya Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakan dan Purnapaskibraka	-	-	-	2 Dokumen	Rp165,322,000	2 Dokumen	Rp165,322,000	4 Dokumen	Rp330,644,000		
				Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakan dan purnapaskibraka	Laporan hasil pembinaan aktivitas kepaskibrakan dan laporan hasil pembinaan purnapaskibraka	-	-	-	2 Dokumen	Rp165,322,000	2 Dokumen	Rp165,322,000	4 Dokumen	Rp330,644,000			
					4	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	-	-	-	102 Orang	Rp1,153,737,300	102 Orang	Rp1,153,737,300	204 Orang	Rp2,307,474,600		
				Pembentukan paskibraka	Jumlah paskibraka	-	-	-	102 Orang	Rp1,153,737,300	102 Orang	Rp1,153,737,300	204 Orang	Rp2,307,474,600			
				8 01 005	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Optimalisasi pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	100%	Rp1,000,000,000	100%	Rp1,200,000,000	100%	Rp1,400,000,000	100%	Rp3,600,000,000	Badan Kesbangpol	Kota Bekasi, Jawa Barat
				8 01 005 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	1.700 Orang	Rp1,000,000,000	1.900 Orang	Rp1,200,000,000	2.100 Orang	Rp1,400,000,000	5.100 Orang	Rp3,600,000,000		
				8 01 005 2.01 003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	1.700 Orang	Rp1,000,000,000	1.900 Orang	Rp1,200,000,000	2.100 Orang	Rp1,400,000,000	5.700 Orang	Rp3,600,000,000		
				8 01 006	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Optimalisasi Penanganan Potensi Konflik Daerah	100%	100%	Rp3,337,400,000	100%	Rp3,337,400,000	100%	Rp3,337,400,000	100%	Rp10,012,200,000	Badan Kesbangpol	Kota Bekasi, Jawa Barat
				8 01 006 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1 Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	400 Orang	Rp845,200,000	400 Orang	Rp845,200,000	400 Orang	Rp845,200,000	1.200 Orang	Rp2,535,600,000		
				8 01 006 2.01 003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	400 Orang	Rp845,200,000	400 Orang	Rp845,200,000	400 Orang	Rp845,200,000	1.200 Orang	Rp2,535,600,000		
		2 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	12 Laporan	Rp537,200,000	12 Laporan	Rp537,200,000	12 Laporan	Rp537,200,000	36 Laporan	Rp1,611,600,000						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		8 01 006 2.01 005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	12 Laporan	Rp537,200,000	12 Laporan	Rp537,200,000	12 Laporan	Rp537,200,000	36 Laporan	Rp1,611,600,000		
				3 Terlaksananya Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota	-	12 Dokumen	Rp1,955,000,000	12 Dokumen	Rp1,955,000,000	12 Dokumen	Rp1,955,000,000	36 Dokumen	Rp5,865,000,000		
		8 01 006 2.01 006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota	-	12 Dokumen	Rp1,955,000,000	12 Dokumen	Rp1,955,000,000	12 Dokumen	Rp1,955,000,000	36 Dokumen	Rp5,865,000,000		
		8 01 003	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>Optimalisasi Pembinaan Politik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Rp80,942,031,000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp80,157,875,000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp80,157,875,000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp241,257,781,000</b>	<b>Badan Kesbangpol</b>	<b>Kota Bekasi, Jawa Barat</b>
		8 01 003 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1 Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	12 Dokumen	Rp79,407,875,000	12 Dokumen	Rp79,407,875,000	12 Dokumen	Rp79,407,875,000	36 Dokumen	Rp238,223,625,000		
		8 01 003 2.01 001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	-	12 Dokumen	Rp79,407,875,000	12 Dokumen	Rp79,407,875,000	12 Dokumen	Rp79,407,875,000	36 Dokumen	Rp238,223,625,000		
				2 Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	2.400 Orang	Rp1,500,000,000	1.135 Orang	Rp750,000,000	1.135 Orang	Rp750,000,000	4.670 Orang	Rp3,000,000,000		
		8 01 003 2.01 004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.1 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	2.400 Orang	Rp1,500,000,000	1.135 Orang	Rp750,000,000	1.135 Orang	Rp750,000,000	4.670 Orang	Rp3,000,000,000		
				3 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	12 Laporan	Rp34,156,000	0 Laporan	-	0 Laporan	-	12 Laporan	Rp34,156,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi		
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		8 01 003 2.01 005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	12 Laporan	Rp34,156,000	0 Laporan	-	0 Laporan	-	12 Laporan	Rp34,156,000				
		8 01 004	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Optimalisasi Pembinaan Organisasi Masyarakat</b>	100%	100%	Rp8,595,411,700	100%	Rp10,300,000,000	100%	Rp10,900,000,000	100%	Rp29,795,411,700	Badan Kesbangpol	Kota Bekasi, Jawa Barat		
		8 01 004 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	1 Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	41 Dokumen	Rp7,850,411,700	51 Dokumen	Rp9,500,000,000	65 Dokumen	Rp10,000,000,000	157 Dokumen	Rp27,350,411,700				
		8 01 004 2.01 001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	-	41 Dokumen	Rp7,850,411,700	51 Dokumen	Rp9,500,000,000	65 Dokumen	Rp10,000,000,000	157 Dokumen	Rp27,350,411,700				
				2 Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	300 Orang	Rp745,000,000	400 Orang	Rp800,000,000	500 Orang	Rp900,000,000	1.200 Orang	Rp2,445,000,000				
		8 01 004 2.01 003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	300 Orang	Rp745,000,000	400 Orang	Rp800,000,000	500 Orang	Rp900,000,000	1.200 Orang	Rp2,445,000,000				
2	Mewujudkan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Bdan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi	2.1	Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Bdan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			Rp12,232,588,740		Rp13,120,588,740		Rp13,120,588,740		Rp37,873,766,220	Badan Kesbangpol	Kota Bekasi, Jawa Barat		
		8 01 001		1 Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	Rp9,123,062,000	100%	Rp9,126,062,000	100%	Rp9,126,062,000	100%	Rp27,375,186,000				
		8 01 001 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	1 Laporan	Rp17,000,000	1 Laporan	Rp20,000,000	1 Laporan	Rp20,000,000	3 Laporan	Rp57,000,000				
		8 01 001 2.01 006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.1.1 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	1 Laporan	Rp17,000,000	1 Laporan	Rp20,000,000	1 Laporan	Rp20,000,000	3 Laporan	Rp57,000,000				
		8 01 001 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.2.1 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	-	1.026 Orang/Bulan	Rp9,098,062,000	1.026 Orang/Bulan	Rp9,098,062,000	1.026 Orang/Bulan	Rp9,098,062,000	3.078 Orang/Bulan	Rp27,294,186,000				
		8 01 001 2.02 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	1.026 Orang/Bulan	Rp9,098,062,000	1.026 Orang/Bulan	Rp9,098,062,000	1.026 Orang/Bulan	Rp9,098,062,000	3.078 Orang/Bulan	Rp27,294,186,000				
				1.2.2 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	-	17 Laporan	Rp8,000,000	17 Laporan	Rp8,000,000	17 Laporan	Rp8,000,000	51 Laporan	Rp24,000,000				
		8 01 001 2.02 007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.2.2 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	-	17 Laporan	Rp8,000,000	17 Laporan	Rp8,000,000	17 Laporan	Rp8,000,000	51 Laporan	Rp24,000,000				
				2 Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	Rp484,927,780	100%	Rp494,927,780	100%	Rp494,927,780	100%	Rp1,474,783,340				
		8 01 001 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.1 Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	2 Paket	Rp200,000,000	2 Paket	Rp200,000,000	2 Paket	Rp200,000,000	6 Paket	Rp600,000,000				
		8 01 001 2.05 002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2.1 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	2 Paket	Rp200,000,000	2 Paket	Rp200,000,000	2 Paket	Rp200,000,000	6 Paket	Rp600,000,000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi	
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
				2.2	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	12 Orang	Rp20,000,000	12 Orang	Rp30,000,000	12 Orang	Rp30,000,000	36 Orang	Rp80,000,000		
		8 01 001 2.05 009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	12 Orang	Rp20,000,000	12 Orang	Rp30,000,000	12 Orang	Rp30,000,000	36 Orang	Rp80,000,000		
				2.3	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	50 Orang	Rp264,927,780	50 Orang	Rp264,927,780	50 Orang	Rp264,927,780	150 Orang	Rp794,783,340		
		8 01 001 2.05 011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.3	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implentasi Peraturan Perundang-Undangan	-	50 Orang	Rp264,927,780	50 Orang	Rp264,927,780	50 Orang	Rp264,927,780	150 Orang	Rp794,783,340		
				3	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	Rp1,972,598,960	100%	Rp2,172,598,960	100%	Rp2,172,598,960	100%	Rp6,317,796,880		
		8 01 001 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.1	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	-	3 Paket	Rp350,000,000	3 Paket	Rp350,000,000	3 Paket	Rp350,000,000	9 Paket	Rp1,050,000,000		
		8 01 001 2.06 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.1	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	3 Paket	Rp350,000,000	3 Paket	Rp350,000,000	3 Paket	Rp350,000,000	9 Paket	Rp1,050,000,000		
				3.2	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	-	12 Paket	Rp50,000,000	12 Paket	Rp75,000,000	12 Paket	Rp75,000,000	36 Paket	Rp200,000,000		
		8 01 001 2.06 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.2	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	12 Paket	Rp50,000,000	12 Paket	Rp75,000,000	12 Paket	Rp75,000,000	36 Paket	Rp200,000,000		
				3.3	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	12 Dokumen	Rp75,000,000	12 Dokumen	Rp75,000,000	12 Dokumen	Rp75,000,000	36 Dokumen	Rp225,000,000		
		8 01 001 2.06 006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.3	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	12 Dokumen	Rp75,000,000	12 Dokumen	Rp75,000,000	12 Dokumen	Rp75,000,000	36 Dokumen	Rp225,000,000		
				3.4	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	12 Laporan	Rp150,000,000	12 Laporan	Rp150,000,000	24 Laporan	Rp300,000,000		
		8 01 001 2.06 008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.4	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	12 Laporan	Rp150,000,000	12 Laporan	Rp150,000,000	24 Laporan	Rp300,000,000		
				3.5	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 Laporan	Rp422,781,750	12 Laporan	Rp422,781,750	12 Laporan	Rp422,781,750	36 Laporan	Rp1,268,345,250		
		8 01 001 2.06 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.5	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 Laporan	Rp422,781,750	12 Laporan	Rp422,781,750	12 Laporan	Rp422,781,750	36 Laporan	Rp1,268,345,250		
				3.6	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	12 Dokumen	Rp50,000,000	12 Dokumen	Rp75,000,000	12 Dokumen	Rp75,000,000	36 Dokumen	Rp200,000,000		
		8 01 001 2.06 010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.6	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	12 Dokumen	Rp50,000,000	12 Dokumen	Rp75,000,000	12 Dokumen	Rp75,000,000	36 Dokumen	Rp200,000,000		
		8 01 001 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.7	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	-	34 Unit	Rp510,218,250	34 Unit	Rp510,218,250	34 Unit	Rp510,218,250	102 Unit	Rp1,530,654,750		
		8 01 001 2.08 006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.7	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	34 Unit	Rp510,218,250	34 Unit	Rp510,218,250	34 Unit	Rp510,218,250	102 Unit	Rp1,530,654,750		
		8 01 001 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	12 Laporan	Rp514,598,960	12 Laporan	Rp514,598,960	12 Laporan	Rp514,598,960	36 Laporan	Rp1,543,796,880		
		8 01 001 2.08 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan	Rp514,598,960	12 Laporan	Rp514,598,960	12 Laporan	Rp514,598,960	36 Laporan	Rp1,543,796,880		
				4	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	Rp652,000,000	100%	Rp1,327,000,000	100%	Rp1,327,000,000	100%	Rp2,706,000,000		
		8 01 001 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22 Unit	22 Unit	Rp377,000,000	22 Unit	Rp377,000,000	22 Unit	Rp377,000,000	66 Unit	Rp1,131,000,000		
		8 01 001 2.09 001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.1	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	22 Unit	Rp377,000,000	22 Unit	Rp377,000,000	22 Unit	Rp377,000,000	66 Unit	Rp1,131,000,000		
				4.2	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25 Unit	25 Unit	Rp75,000,000	25 Unit	Rp750,000,000	25 Unit	Rp750,000,000	75 Unit	Rp1,575,000,000		
		8 01 001 2.09 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.2	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit	Rp75,000,000	25 Unit	Rp750,000,000	25 Unit	Rp750,000,000	75 Unit	Rp1,575,000,000		
				4.3	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	1 Unit	Rp200,000,000	1 Unit	Rp200,000,000	1 Unit	Rp200,000,000	3 Unit	Rp600,000,000		
		8 01 001 2.09 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.3	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit	Rp200,000,000	1 Unit	Rp200,000,000	1 Unit	Rp200,000,000	3 Unit	Rp600,000,000		
<b>TOTAL</b>								<b>Rp108,398,244,300</b>		<b>Rp110,911,993,740</b>		<b>Rp109,811,993,740</b>		<b>Rp326,622,231,780</b>		

Lampiran Rencana Strategis  
Perubahan Badan Kesatuan  
Bangsa dan Politik Kota Bekasi  
2024 – 2026



<https://bitly.ws/3egGx>

*Dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi tahun 2024 – 2026 (Rancangan Akhir) – Substansi Kepmendagri 050 – 5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.*